

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian

Laporan Keuangan Tahunan (AUDITED)

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017



BUKU 2

Jalan Tentara Pelajar No.12 Cimanggu
Bogor 16114

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bogor, 20 April 2018
Kepala Balai Besar,

Prof. Dr. Risfaheri, MSi
NIP. 196401171989031002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan 1

A. Penjelasan Umum 1

B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 15

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca 23

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional 34

E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 44

F. Pengungkapan Penting Lainnya 47

VI. Lampiran dan Daftar

1. DIPA dan Revisi TA 2017
 2. POK dan Revisi TA 2017
 3. Neraca Percobaan
 4. Laporan Operasional (LO)
 5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 6. Neraca
 7. Laporan Realisasi Anggaran Satker
 8. Laporan Kinerja
 9. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
 10. Laporan Pengembalian Belanja
 11. Laporan Realisasi Pendapatan
 12. Laporan Pengembalian Pendapatan
 13. Berita Acara Rekonsiliasi E-Rekon
 14. Formulir Memo Penyesuaian
 15. Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel
 16. Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel
 17. Laporan Barang Kuasa Pengguna Gabungan Intra & Ekstra
 18. Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Bersejarah
 19. Laporan Barang Kuasa Pengguna Aset Tak Berwujud
 20. Laporan Barang Kuasa Pengguna Konst. Dlm Pengerjaan
 21. Laporan Penyusutan dan Amortisasi Kuasa Pengguna Barang Intrakomptabel
 22. Laporan Penyusutan dan Amortisasi Kuasa Pengguna Barang Ekstrakomptabel
 23. Laporan Penyusutan dan Amortisasi Kuasa Pengguna Barang Gabungan Intra & Ekstra
 24. Laporan Penyusutan dan Amortisasi Kuasa Pengguna Barang Aset Tak Berwujud
 25. Laporan Barang Kuasa Pengguna Persediaan
 26. Laporan Posisi BMN di Neraca
 27. Laporan Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali
 28. Laporan Hasil Revaluasi Aset Tahun 2017
 29. BAR Internal Petugas SAK dengan Bendahara Pengeluaran, LPJ dan Penutupan BKU Bendahara Pengeluaran
 30. BAR Internal Petugas SAK dengan Bendahara Penerimaan, LPJ dan Penutupan BKU Bendahara Penerimaan
-

31. Laporan Saldo Rekening yang dikelola Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan
 32. Daftar SPM/SP2D Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Pertanggungjawaban UP/TUP
 33. Bukti Setor Sisa UP Bendahara Pengeluaran TA 2016 yang telah disetor ke Kas Negara TA 2017
 34. Bukti Setor Sisa UP/TUP Bendahara Pengeluaran TA 2017 yang telah disetor ke Kas Negara
 35. Bukti Setor Saldo Kas Tunai Bendahara Penerimaan TA 2016 yang telah disetor ke Kas Negara TA 2017
 36. Daftar bukti setor SSBP/SSPB TA 2017
 37. SKTJM atas hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
 38. Daftar Piutang dan bukti setor pelunasan ke Kas Negara
 39. BAST Transfer Masuk Aset
 40. BAST 526 yang keluar di TA 2017
 41. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan
-

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 20 April 2018
Kepala Balai Besar,

Prof. Dr. Risfaheri, MSi
NIP. 196401171989031002

Laporan Keuangan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian Tahun Anggaran 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.271.403.058,00 atau mencapai 105,95% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.200.000.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp23.368.188.619,00 atau mencapai 98,52% dari alokasi anggaran sebesar semula Rp23.820.000.000,00 dan anggaran setelah revisi sebesar Rp23.720.000.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp168.396.909.257,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp168.750.250,00; Piutang Jangka Panjang (*netto*) sebesar Rp16.482.175,00; Aset Tetap (*netto*) sebesar Rp168.197.589.082,00; dan Aset Lainnya (*netto*) sebesar Rp14.087.750,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp12.343.900,00 dan Rp168.384.565.357,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.120.264.396,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp31.121.933.165,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp30.001.668.769,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp92.843.662,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp29.908.825.107,00.

4.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp106.163.076.881,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp29.908.825.107,00 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp70.034.308.311,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp22.096.005.272,00 sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp168.384.565.357,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN
PERTANIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 (AUDITED) DAN
31 DESEMBER 2016 (AUDITED)**

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | TA 2017 | | % thd Angg | TA 2016 |
|----------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | | REALISASI |
| PENDAPATAN | | | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1 | 1.200.000.000 | 1.271.403.058 | 105,95 | 1.146.454.740 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 1.200.000.000 | 1.271.403.058 | 105,95 | 1.146.454.740 |
| | | | | | |
| BELANJA | B.2 | | | | |
| Belanja Pegawai | B.2.1 | 11.000.000.000 | 10.677.787.644 | 97,07 | 10.333.413.291 |
| Belanja Barang | B.2.2 | 11.656.921.000 | 11.622.961.686 | 99,71 | 13.577.160.496 |
| Belanja Modal | B.2.3 | 1.063.079.000 | 1.055.987.000 | 99,33 | 13.817.544.000 |
| JUMLAH BELANJA | | 23.720.000.000 | 23.356.736.330 | 98,47 | 37.728.117.787 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN
PERTANIAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2016 (AUDITED)**

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 31 DESEMBER 2017 | 31 DESEMBER 2016 |
|--|---------|------------------------|------------------------|
| ASET | | | |
| Aset Lancar | C.1 | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | C.1.1 | - | 15.518.000 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | C.1.2 | 123.385.000 | 210.245.000 |
| Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | C.1.3 | 12.000.000 | - |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | C.1.4 | (60.000) | - |
| <i>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i> | | <i>11.940.000</i> | - |
| Persediaan | C.1.5 | 33.425.250 | 262.239.300 |
| Jumlah Aset Lancar | | 168.750.250 | 488.002.300 |
| Aset Tetap | C.2 | | |
| Tanah | C.2.1 | 71.234.352.000 | 22.447.800.000 |
| Peralatan dan Mesin | C.2.2 | 81.463.888.778 | 82.554.927.578 |
| Gedung dan Bangunan | C.2.3 | 55.324.515.602 | 34.310.246.652 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | C.2.4 | 3.141.981.800 | 10.443.066.800 |
| Aset Tetap Lainnya | C.2.5 | 97.294.780 | 97.294.780 |
| Akumulasi Penyusutan | C.2.6 | (43.064.443.878) | (44.166.863.229) |
| Jumlah Aset Tetap | | 168.197.589.082 | 105.686.472.581 |
| Piutang Jangka Panjang | C.3 | | |
| Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | C.3.1 | 16.565.000 | - |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | C.3.2 | (82.825) | - |
| <i>Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i> | | <i>16.482.175</i> | - |
| Jumlah Piutang Jangka Panjang | | 16.482.175 | - |
| Aset Lainnya | C.4 | | |
| Aset Tak Berwujud | C.4.1 | 15.985.000 | 4.900.000 |
| Aset Lain-lain | C.4.2 | 1.939.503.800 | 262.850.001 |
| Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya | C.4.3 | (1.941.401.050) | (263.630.001) |
| Jumlah Aset Lainnya | | 14.087.750 | 4.120.000 |
| JUMLAH ASET | | 168.396.909.257 | 106.178.594.881 |
| KEWAJIBAN | | | |
| Kewajiban Jangka Pendek | C.5 | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | C.5.1 | 12.343.900 | - |
| Uang Muka dari KPPN | C.5.2 | - | 15.518.000 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 12.343.900 | 15.518.000 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | 12.343.900 | 15.518.000 |
| EKUITAS | | | |
| Ekuitas | C.6 | | |
| Ekuitas | C.6.1 | 168.384.565.357 | 106.163.076.881 |
| JUMLAH EKUITAS | | 168.384.565.357 | 106.163.076.881 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 168.396.909.257 | 106.178.594.881 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL**BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN
PERTANIAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 (AUDITED) DAN
31 DESEMBER 2016 (AUDITED)***(Dalam Rupiah)*

| URAIAN | CATATAN | 31 DESEMBER 2017 | 31 DESEMBER 2016 |
|--|---------|-------------------------|-------------------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | |
| PENDAPATAN | | | |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | D.1 | 1.120.264.396 | 1.266.317.049 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 1.120.264.396 | 1.266.317.049 |
| BEBAN | | | |
| Beban Pegawai | D.2 | 10.690.131.544 | 10.333.413.291 |
| Beban Persediaan | D.3 | 2.503.324.667 | 3.194.308.636 |
| Beban Barang dan Jasa | D.4 | 4.570.130.941 | 4.546.866.456 |
| Beban Pemeliharaan | D.5 | 2.001.490.802 | 2.247.749.242 |
| Beban Perjalanan Dinas | D.6 | 2.516.611.326 | 3.569.477.386 |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat | D.7 | 260.218.000 | 1.378.754.800 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | D.8 | 8.579.883.060 | 9.590.287.716 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | D.9 | 142.825 | - |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | | 31.121.933.165 | 34.860.857.527 |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL | | (30.001.668.769) | (33.594.540.478) |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | | 3.000.000 | - |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | 89.843.662 | 90.382.691 |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | - | 77.000 |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | D.10 | 92.843.662 | 90.305.691 |
| SURPLUS/DEFISIT - LO | | (29.908.825.107) | (33.504.234.787) |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN
PERTANIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 (AUDITED) DAN
31 DESEMBER 2016 (AUDITED)**

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 31 DESEMBER 2017 | 31 DESEMBER 2016 |
|---|---------|------------------------|------------------------|
| EKUITAS AWAL | E.1 | 106.163.076.881 | 106.138.988.556 |
| SURPLUS/DEFISIT - LO | E.2 | (29.908.825.107) | (33.504.234.787) |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | | 70.034.308.311 | 453.850.655 |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | E.3 | 70.034.308.311 | - |
| Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi | | - | 453.850.655 |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | E.4 | 22.096.005.272 | 33.074.472.457 |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | | 62.221.488.476 | 24.088.325 |
| EKUITAS AKHIR | E.5 | 168.384.565.357 | 106.163.076.881 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Institusi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian yang ber-eselon II-B merupakan pengembangan dari : (1) Balai Penelitian Pascapanen Pertanian (Balitpasca), sesuai SK Menteri Pertanian No.76/Kpts/OT.210/1/2002 tanggal 29 Januari 2002 dan (2) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, sesuai SK Menteri Pertanian No.632/Kpts/OT.140/12/2003 tanggal 10 Desember 2003. Berdasarkan SK Menteri Pertanian No.36/PERMENTAN/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen memiliki tugas melaksanakan dan merumuskan program penelitian dan pengembangan teknologi pascapanen pertanian.

Dengan perubahan status organisasi tersebut, maka diperlukan kelembagaan yang mapan dan sumber daya yang kuat dan handal dalam menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan pascapanen. Semakin luasnya jangkauan penelitian dan pengembangan, semakin besar pula sumber daya, sumber dana, pengelolaan administrasi keuangan dan kebutuhan sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian berkomitmen, untuk kurun waktu 2015-2019 mempunyai visi **“Menjadi Lembaga Penelitian Terkemuka Penghasil Teknologi dan Inovasi Pascapanen Pertanian, Mendukung Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menghasilkan dan mengembangkan inovasi pascapanen dalam rangka pencapaian swasembada pangan, pencapaian diversifikasi panagn, serta peningkatan nilai tambah dan daya saing;
- Meningkatkan hilirisasi dan percepatan adopsi inovasi pascapanen pertanian untuk stakholder;
- Meningkatkan kualitas dan pengelolaan sumberdaya penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian dalam menghasilkan teknologi dan inovasi bernilai ilmiah tinggi.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel di tahun 2017, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian telah melakukan perjanjian kinerja dengan sasaran kegiatan tersediannya teknologi dan rekomendasi kebijakan pascapanen hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam upaya mendukung sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan, antara lain melalui pemanfaatan nanoteknologi, iradasi, bioprocessing dan bioinformatika. Untuk mencapai sasaran tersebut, target indikator kinerja kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017 adalah:

1. Jumlah teknologi pascapanen (penanganan dan pengolahan) Komoditas Strategis dan Komoditas Unggulan Lainnya, dengan target 15 teknologi;
2. Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan pascapanen pertanian, dengan target 3 rekomendasi.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut

didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|-------------------------|--|-------------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan | 100% |
| | 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya

apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi

dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|--|---------------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

| Kelompok Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat (tahun) |
|---|-----------------------------|
| <i>Software</i> Komputer | 4 |
| <i>Franchise</i> | 5 |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | 10 |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim. | 20 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram. | 50 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I | 70 |

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian* telah melakukan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dari POK/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal yang diajukan ke Kanwil Jawa Barat, dan secara sistem mengakibatkan terjadinya revisi DIPA. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

| Uraian | 2017 | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | ANGGARAN AWAL | ANGGARAN SETELAH REVISI |
| Pendapatan | | |
| Pendapatan Jasa | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 |
| Jumlah Pendapatan | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 |
| Belanja | | |
| Belanja Pegawai | 11.000.000.000 | 11.000.000.000 |
| Belanja Barang | 11.756.921.000 | 11.656.921.000 |
| Belanja Modal | 1.063.079.000 | 1.063.079.000 |
| Jumlah Belanja | 23.820.000.000 | 23.720.000.000 |

Realisasi Pendapatan
Rp1.271.403.058,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.271.403.058,00 atau mencapai 105,95% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.200.000.000,00. Pendapatan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan, Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

| Uraian | 2017 | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | ANGGARAN | Realisasi | % Real Angg. |
| Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan | - | 24.907.750 | #DIV/0! |
| Pendapatan Jasa | 1.200.000.000 | 1.184.750.000 | 98,73 |
| Pendapatan Lain-lain | - | 61.745.308 | #DIV/0! |
| Jumlah | 1.200.000.000 | 1.271.403.058 | 105,95 |

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2017 (*audited*) mengalami kenaikan 10,90% dibandingkan Tahun Anggaran 2016 (*audited*). Hal ini disebabkan adanya peningkatan konsumen dalam pelayanan jasa analisa Laboratorium Nano sebesar 26,95% dari Tahun Anggaran 2016 dan telah terbitnya PP tarif No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBPN Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2017(Audited) dan Tahun Anggaran 2016 (Audited)

| URAIAN | REALISASI 31 DESEMBER 2017 | REALISASI 31 DESEMBER 2016 | NAIK (TURUN) % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan | 24.907.750 | 75.562.059 | (67,04) |
| Pendapatan Jasa | 1.184.750.000 | 933.220.000 | 26,95 |
| Pendapatan Iuran dan Denda | - | 47.280.000 | (100,00) |
| Pendapatan Lain-lain | 61.745.308 | 90.392.681 | (31,69) |
| Jumlah | 1.271.403.058 | 1.146.454.740 | 10,90 |

Realisasi Belanja
Negara
Rp23.368.188.619,00

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp23.368.188.619,00 atau 98,52% dari anggaran belanja sebesar Rp23.720.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017

| Uraian | 2017 | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | ANGGARAN | Realisasi | % Real Angg. |
| Belanja Pegawai | 11.000.000.000 | 10.689.239.933 | 97,17 |
| Belanja Barang | 11.656.921.000 | 11.622.961.686 | 99,71 |
| Belanja Modal | 1.063.079.000 | 1.055.987.000 | 99,33 |
| Total Belanja Kotor | 23.720.000.000 | 23.368.188.619 | 98,52 |
| Pengembalian | - | 11.452.289 | #DIV/0! |
| Jumlah | 23.720.000.000 | 23.356.736.330 | 98,47 |

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 (*audited*), Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017 (*audited*) mengalami penurunan sebesar 38,09%. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Menurunnya alokasi pagu belanja Tahun Anggaran 2017 sebesar 38,38% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016, berpengaruh terhadap realisasi belanja Tahun Anggaran 2017 menjadi menurun.
2. Dengan alokasi pagu anggaran yang menurun, kegiatan di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, baik untuk kegiatan manajemen maupun kegiatan penelitian secara otomatis berkurang jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016.
3. Telah terpenuhinya kegiatan pengadaan belanja

modal di Tahun Anggaran 2016, yang mengakibatkan bertambahnya aset Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian. Sehingga Tahun Anggaran 2017 alokasi belanja modal berkurang.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017 (Audited) dan Tahun Anggaran 2016 (Audited)

| URAIAN | REALISASI 31 DESEMBER 2017 | REALISASI 31 DESEMBER 2016 | NAIK (TURUN) % |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Belanja Pegawai | 10.689.239.933 | 10.336.021.626 | 3,42 |
| Belanja Barang | 11.622.961.686 | 13.586.799.796 | (14,45) |
| Belanja Modal | 1.055.987.000 | 13.821.324.000 | (92,36) |
| Jumlah Belanja Kotor | 23.368.188.619 | 37.744.145.422 | (38,09) |
| Pengembalian Belanja | 11.452.289 | 16.027.635 | (28,55) |
| Jumlah Belanja | 23.356.736.330 | 37.728.117.787 | (38,09) |

Belanja Pegawai

Rp10.689.239.933,00

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 (*audited*) dan Tahun Anggaran 2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp10.689.239.933,00 dan Rp10.336.021.626,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negara Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2017 (*audited*) mengalami kenaikan sebesar 3,42% persen dari Tahun Anggaran

2016 (*audited*). Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan kenaikan tunjangan fungsional untuk 127 PNS, sehingga berpengaruh terhadap penyerapan realisasi belanja gaji dan tunjangan PNS Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan 0,56%.
2. Terbitnya PMK No.78/PMK.02/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang perubahan atas PMK No.33/PMK.02/2016 tentang standar biaya masukan Tahun Anggaran 2017, salah satunya mengatur dan menindaklanjuti penyesuaian uang makan PNS. Sehingga berpengaruh terhadap penyerapan belanja uang makan PNS Tahun Anggaran 2017 yang mengalami kenaikan 7,67%.
3. Atas dasar PMK No.78/PMK.02/2017 tanggal 14 Juni 2017, terdapat juga penyesuaian uang makan lembur PNS, yang berpengaruh terhadap realisasi belanja lembur.
4. Meningkatnya kegiatan/pekerjaan di luar jam kerja kantor, sebagai upaya dalam rangka pemenuhan logistik untuk mendukung kegiatan UPSUS, diseminasi dan kegiatan manajemen.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017(Audited) dan Tahun Anggaran 2016 (Audited)

| URAIAN | REALISASI 31 DESEMBER 2017 | REALISASI 31 DESEMBER 2016 | NAIK (TURUN) % |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 9.506.238.933 | 9.453.019.626 | 0,56 |
| Belanja Makan | 856.586.000 | 795.558.000 | 7,67 |
| Belanja Lembur | 326.415.000 | 87.444.000 | 273,28 |
| Belanja Transito | - | - | |
| Jumlah Belanja Kotor | 10.689.239.933 | 10.336.021.626 | 3,42 |
| Pengembalian Belanja | 11.452.289 | 2.608.335 | 339,07 |
| Jumlah Belanja | 10.677.787.644 | 10.333.413.291 | 3,33 |

Belanja Barang

Rp11.622.961.686,00

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 (*audited*) dan Tahun Anggaran 2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp11.622.961.686,00 dan Rp13.577.160.496,00. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 mengalami penurunan 14,45% dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 (*audited*). Hal ini disebabkan antara lain:

1. Menurunnya alokasi pagu belanja barang Tahun Anggaran 2017 sebesar 18,41% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016.
2. Pada bulan Juli 2017 terdapat kebijakan pemerintah *selfblocking* terhadap alokasi pagu Tahun Anggaran 2017. Sehingga pelaksanaan kegiatan manajemen maupun penelitian berkurang, dan berpengaruh terhadap realisasi belanja barang.
3. Efisiensi penggunaan belanja persediaan dan belanja perjalanan dinas.

*Perbandingan Belanja Barang Tahun Anggaran
2017(Audited) dan Tahun Anggaran 2016 (Audited)*

| URAIAN | REALISASI 31 DESEMBER 2017 | REALISASI 31 DESEMBER 2016 | NAIK (TURUN) % |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Belanja Barang Non Operasional | 1.522.660.600 | 1.466.438.225 | 3,83 |
| Belanja Barang Persediaan | 2.620.069.517 | 3.433.538.211 | (23,69) |
| Belanja Jasa | 1.487.081.108 | 1.452.969.957 | 2,35 |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 2.516.611.326 | 3.569.606.686 | (29,50) |
| Belanja Barang Operasional | 1.560.389.233 | 1.655.090.500 | (5,72) |
| Belanja Pemeliharaan | 1.916.149.902 | 2.009.156.217 | (4,63) |
| Jumlah Belanja Kotor | 11.622.961.686 | 13.586.799.796 | (14,45) |
| Pengembalian Belanja | - | 9.639.300 | (100,00) |
| Jumlah Belanja | 11.622.961.686 | 13.577.160.496 | (14,39) |

Belanja Modal

Rp1.055.987.000,00

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 (*audited*) dan Tahun Anggaran 2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp1.055.987.000,00 dan Rp13.821.324.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2017 (*audited*) mengalami penurunan sebesar 92,36% dibandingkan Tahun Anggaran 2016 (*audited*). Hal ini disebabkan oleh:

1. Menurunnya pagu anggaran belanja modal Tahun Anggaran 2017 sebesar 92,31% dibanding Tahun Anggaran 2016.
2. Kebutuhan akan pengadaan aset sebagai

penunjang pelaksanaan operasional kegiatan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian sudah berkurang dengan terpenuhinya belanja modal pada Tahun Anggaran 2016.

3. Tidak adanya alokasi pagu anggaran belanja modal Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari dana pinjaman dan hibah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 (Audited) dan Tahun Anggaran 2016 (Audited)

| URAIAN | REALISASI 31 DESEMBER 2017 | REALISASI 31 DESEMBER 2016 | NAIK (TURUN) % |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 539.815.000 | 13.821.324.000 | (96,09) |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 516.172.000 | - | #DIV/0! |
| Jumlah Belanja Kotor | 1.055.987.000 | 13.821.324.000 | (92,36) |
| Pengembalian Belanja | - | 3.780.000 | (100,00) |
| Jumlah Belanja | 1.055.987.000 | 13.817.544.000 | (92,36) |

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2017 (*audited*) adalah sebesar Rp539.815.000,00, mengalami penurunan sebesar 96,09% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016 (*audited*) sebesar Rp13.821.324.000,00. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan fasilitas peralatan dan mesin sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian sudah terpenuhi/terrealisasi di Tahun

Anggaran 2016, sehingga Tahun Anggaran 2017 alokasi pagu anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin menurun.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2017 (Audited) dan Tahun Anggaran 2016 (Audited)

| URAIAN | REALISASI 31 DESEMBER 2017 | REALISASI 31 DESEMBER 2016 | NAIK (TURUN) % |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Alat Kantor | 31.720.000 | 1.728.746.000 | (98,17) |
| Alat Rumah Tangga | 67.100.000 | 16.162.000 | 315,17 |
| Unit Alat Laboratorium | 330.580.000 | 12.064.416.000 | (97,26) |
| Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 22.800.000 | - | #DIV/0! |
| Komputer Unit | 32.655.000 | 12.000.000 | 172,13 |
| Peralatan Komputer | 54.960.000 | - | #DIV/0! |
| Jumlah Belanja Kotor | 539.815.000 | 13.821.324.000 | (96,09) |
| Pengembalian Belanja | - | 3.780.000 | -100 |
| Jumlah Belanja | 539.815.000 | 13.817.544.000 | (96,09) |

B.2.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2017 (*audited*) dan Tahun Anggaran 2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp516.172.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2017 (*audited*) mengalami peningkatan sebesar 100,00% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2016 (*audited*). Hal ini disebabkan, Tahun Anggaran 2017 telah dialokasikan belanja modal gedung dan bangunan, yang merupakan salah satu upaya dalam rangka menunjang pelaksanaan pengembangan/peningkatan pelayanan jasa analisa laboratorium Balai Besar Penelitian dan

Pengembangan Pascapanen Pertanian.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

Tahun Anggaran 2017 (Audited) dan Tahun Anggaran 2016 (Audited)

| URAIAN | REALISASI 31 DESEMBER 2017 | REALISASI 31 DESEMBER 2016 | NAIK (TURUN) % |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Bangunan Gedung Tempat Kerja | 516.172.000 | - | #DIV/0! |
| Jumlah Belanja Kotor | 516.172.000 | - | #DIV/0! |
| Pengembalian Belanja | - | - | #DIV/0! |
| Jumlah Belanja | 516.172.000 | - | #DIV/0! |

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00*

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp15.518.000,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 (Audited) dan 31 Desember 2016 (Audited)

| Keterangan | 31 DESEMBER 2017 | 31 DESEMBER 2016 |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Persekot | - | - |
| Kas Tunai | - | 15.518.000 |
| Bank BNI No. Acc 0047974967 | - | - |
| Kuitansi yang belum di SPP GU-kan | - | - |
| Jumlah | - | 15.518.000 |

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp123.385.000,00*

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp123.385.000,00 dan Rp210.245.000,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember
2017 (Audited) dan 31 Desember 2016 (Audited)*

| Keterangan | 31 DESEMBER 2017 | 31 DESEMBER 2016 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Uang Tunai | - | 210.245.000 |
| Bank BNI No. Acc 0217835093 | 123.385.000 | - |
| Jumlah | 123.385.000 | 210.245.000 |

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp123.385.000,00 merupakan hasil jasa analisa Laboratorium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2017.

Bagian Lancar

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan

/Tuntutan Ganti

RugiRp12.000.00

0,00

C.1.3 Piutang Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) masing-masing sebesar Rp12.000.000,00 dan Rp0,00

Bagian Lancar Tp/TGR sebesar Rp12.000.000,00 adalah TP/TGR pegawai bukan bendahara yang belum dilunasi untuk periode per 31 Desember 2017 dan merupakan reklas atas piutang jangka panjang TP/TGR kelebihan bayar kepada pegawai untuk tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional dengan debitur Ir. Sunarmani.

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp60.000,00

C.1.4 Penyisihan Piutang Tidak tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah sebesar Rp60.000,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahun Anggaran 2017 (Audited) dan Tahun Anggaran 2016 (Audited)

| Kualitas Piutang | Nilai Piutang Jk Pendek | % Penyisihan | Nilai Penyisihan |
|---|-------------------------|--------------|------------------|
| Piutang Bukan Pajak | | | |
| Lancar | - | 0,50% | - |
| Kurang Lancar | - | 10% | - |
| Diragukan | - | 50% | - |
| Macet | - | 100% | - |
| Jumlah | - | | - |
| Bagian Lancar TP/TGR | | | |
| Lancar | 12.000.000 | 0,50% | 60.000 |
| Kurang Lancar | - | 10% | - |
| Diragukan | - | 50% | - |
| Macet | - | 100% | - |
| Jumlah | 12.000.000 | | 60.000 |
| Bagian Lancar TPA | | | |
| Lancar | - | 0,50% | - |
| Kurang Lancar | - | 10% | - |
| Diragukan | - | 50% | - |
| Macet | - | 100% | - |
| Jumlah | - | | - |
| Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih | 12.000.000 | | 60.000 |

Persediaan
Rp33.425.250,00

C.1.5 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) masing-masing adalah sebesar Rp33.425.250,00 dan Rp262.239.300,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 (Audited) dan
31 Desember 2016 (Audited)*

| Keterangan | 31 DESEMBER 2017 | 31 DESEMBER 2016 |
|--|-------------------|--------------------|
| Barang Konsumsi | 6.435.550 | 1.148.800 |
| Bahan untuk Pemeliharaan | - | 147.500 |
| Bahan Baku | 26.989.700 | 725.000 |
| Peralatan dan Mesin utk Dijual/Diserahkan kpd Masyarakat | - | 260.218.000 |
| Jumlah | 33.425.250 | 262.239.300 |

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik dan dituangkan dalam Berita Acara Stock Opname Fisik Barang Persediaan No. 04/PL.030/H.10/01/2018 tanggal 2 Januari 2018.

Tanah

Rp71.234.352.000,00

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah sebesar Rp71.234.352.000,00 dan Rp22.447.800.000,00. Pada Tahun Anggaran 2017 tidak terjadi kenaikan maupun penurunan nilai aset tetap Tanah. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 | 22.447.800.000 |
| Mutasi tambah : | 48.786.552.000 |
| Pembelian | - |
| Selisih revaluasi aset | 48.786.552.000 |
| Mutasi kurang : | - |
| Penghapusan | - |
| Penyitaan pengadilan | - |
| Saldo per 31 Desember 2017 | 71.234.352.000 |
| Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2017 | - |
| Nilai Buku per 31 Desember 2017 | 71.234.352.000 |

Mutasi tambah:

- Revaluasi atas tanah dilaksanakan pada semester II tahun 2017 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp48.786.552.000,00 yang terdapat pada:

| No | Entitas | Selisih Nilai Revaluasi |
|----|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 22.908.672.000 |
| 2 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 25.877.880.000 |

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2017 (*audited*) adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah per 31 Desember 2017

| No | Luas | Lokasi | Nilai |
|---------------|--------------|--|-----------------------|
| 1 | 0,00 m2 | Tentara Pelajar No.12 Cimanggu Bogor Rt.04/007, Bogor Tengah | - |
| 2 | 9.760,00 m2 | Surotokunto Rawabagus Karawang Timur | 33.449.472.000 |
| 3 | 11.025,00 m2 | Surotokunto Rawabagus Karawang Timur | 37.784.880.000 |
| Jumlah | | | 71.234.352.000 |

Peralatan dan Mesin

Rp81.463.888.778,00

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah Rp81.463.888.778,00 dan Rp82.554.927.578,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 | 82.554.927.578 |
| Mutasi tambah : | 694.565.000 |
| Pembelian | 539.815.000 |
| Penggunaan kembali kend. Roda 4 yg dihentikan | 154.750.000 |
| Pengembangan | - |
| Mutasi kurang : | 1.785.603.800 |
| Penghentian dari penggunaan | 1.785.603.800 |
| Saldo per 31 Desember 2017 | 81.463.888.778 |
| Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2017 | 40.344.199.757 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2017 | 41.119.689.021 |

Transaksi mutasi tambah:

- Pembelian peralatan dan mesin berupa:
 - a. Pembelian 2 Note Book senilai Rp32.655.000,00
 - b. Pembelian 2 LCD Projector/Infocus senilai Rp29.800.000,00
 - c. Pembelian 2 Scanner (Peralatan Mini Komputer) senilai Rp17.200.000,00
 - d. Pembelian 3 Printer (Peralatan Personal Komputer) senilai Rp10.990.000,00
 - e. Pembelian 5 Wireless Access Point senilai Rp9.125.000,00
 - f. Pembelian 3 Server senilai Rp17.645.000,00
 - g. Pembelian 8 AC. Split senilai Rp67.100.000,00
 - h. Pembelian 3 Refrigerator/Freezer senilai Rp22.800.000,00
 - i. Pembelian 1 Deep Freezer (Alat Laboratorium Pertanian) senilai Rp6.200.000,00
 - j. Pembelian 8 Alat Laboratorium Umum Lainnya senilai Rp183.100.000,00
 - k. Pembelian 1 Fumehood senilai Rp134.730.000,00
 - l. Pembelian 2 Rak Besi senilai Rp1.920.000,00
 - m. Pembelian 2 Vortex Mixer senilai Rp3.600.000,00
 - n. Pembelian 1 Freezer (Alat Laboratorium Pertanian) senilai Rp2.950.000,00

- Penggunaan kembali kend. Roda 4 yang dihentikan senilai Rp154.750.000,00

Transaksi mutasi kurang peralatan dan mesin berupa:

- Penghentian peralatan dan mesin dari penggunaan senilai Rp1.785.603.800,00

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan

Bangunan

Rp55.324.515.602,00

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah Rp55.324.515.602,00 dan Rp34.310.246.652,000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 | 34.310.246.652 |
| Mutasi tambah : | 23.224.762.294 |
| Pembangunan tambahan renovasi gedung | 516.172.000 |
| Revaluasi aset | 22.708.590.294 |
| Mutasi kurang : | 2.210.493.344 |
| Koreksi semu hasil penilaian kembali | 2.210.493.344 |
| Saldo per 31 Desember 2017 | 55.324.515.602 |
| Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2017 | 2.314.423.567 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2017 | 53.010.092.035 |

Transaksi mutasi tambah gedung dan bangunan berupa:

- Renovasi laboratorium pengembangan, renovasi gedung show window instalasi Karawang dan renovasi toilet senilai Rp516.172.000,00
- Revaluasi atas Gedung dan Bangunan dilaksanakan pada semester II tahun 2017 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp22.708.590.294,00 yang terdapat pada:

| No | Entitas | Selisih Nilai Revaluasi |
|--------|---|-------------------------|
| 1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 574.342.490 |
| 2 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | 1.065.652.165 |
| 3 | Bangunan Gedung Instalasi Lainnya | (8.501.530) |
| 4 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 17.106.522.166 |
| 5 | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen | (534.367.400) |
| 6 | Gedung Garasi/Pool Permanen | (42.433.164) |
| 7 | Bangunan Gedung Garasi/Pool Lainnya | 91.307.230 |
| 8 | Bangunan Lantai Jemur Permanen | 1.361.271.178 |
| 9 | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen | 1.207.281.918 |
| 10 | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | 428.978.255 |
| 11 | Kerangka Dasar Kadastral Orde 2 | 1.007.035.566 |
| 12 | Pagar Semi Permanen | 451.501.420 |
| Jumlah | | 22.708.590.294 |

Transaksi mutasi kurang gedung dan bangunan berupa:

- Koreksi semu hasil penilaian kembali sebesar Rp2.210.493.344,00

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Jaringan dan Irigasi
Rp3.141.981.800,00

C.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp3.141.981.800,00 dan Rp10.433.066.800,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 | 10.443.066.800 |
| Mutasi tambah : | (1.460.833.983) |
| Pengembangan | - |
| Revaluasi aset | (1.460.833.983) |
| Mutasi kurang : | 5.840.251.017 |
| Koreksi semu hasil penilaian kembali | 5.840.251.017 |
| Saldo per 31 Desember 2017 | 3.141.981.800 |
| Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2017 | 405.820.554 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2017 | 2.736.161.246 |

Transaksi mutasi tambah jalan, jembatan dan irigasi berupa:

- Penyusutan revaluasi aset dilaksanakan pada semester II tahun 2017 dengan selisih nilai penyusutan revaluasi sebesar Rp1.460.833.983,00 terdapat pada Jalan khusus komplek, jalan khusus lainnya, saluran lalu lintas air dan jalan khusus perorangan kantor Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian di Jl. Tentara Pelajar No.12 Bogor dan Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Serelalia Surotokunto Rawabagus Karawang Timur.

Transaksi mutasi kurang jalan, jembatan dan irigasi berupa:

- Koreksi semu hasil penilaian kembali sebesar Rp5.840.251.017,00

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap

Lainnya

Rp97.294.780,00

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah Rp97.294.780,00 dan Rp97.294.780,00. Aset tetap tersebut berupa barang buku. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk periode 31 Desember 2017 (*audited*), sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

| | |
|---|-------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 | 97.294.780 |
| Mutasi tambah: | - |
| Pembelian | - |
| Mutasi kurang: | - |
| Penghentian dari penggunaan | - |
| Saldo per 31 Desember 2017 | 97.294.780 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017 | - |
| Nilai Buku per 31 Desember 2017 | 97.294.780 |

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi

Penyusutan Aset Tetap
Rp43.064.443.878,00

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing-masing Rp43.064.443.878,00 dan Rp44.166.863.229,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 (*audited*), sedangkan Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

| No. | Aset Tetap | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|-----|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 81.463.888.778 | 40.344.199.757 | 41.119.689.021 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 55.324.515.602 | 2.314.423.567 | 53.010.092.035 |
| 3 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 3.141.981.800 | 405.820.554 | 2.736.161.246 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | 139.930.386.180 | 43.064.443.878 | 96.865.942.302 |

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi **C.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**
Rp16.565.000,00

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) masing-masing sebesar Rp16.565.000,00 dan Rp0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian negara.

Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp16.565.000,00 adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional yang belum dilunasi per 31 Desember 2017.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2017 (*audited*) adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2017 (Audited) dan 31 Desember 2016 (Audited)

| Debitur | 31 DESEMBER 2017 | 31 DESEMBER 2016 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Ir. Sunarmani | 16.565.000 | - |
| Jumlah | 16.565.000 | - |

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan
/Tuntutan Ganti
Rugi Rp82.825,00

C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp82.825,00 dan Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti per 31 Desember 2017 (Audited) dan 31 Desember 2016 (Audited)

| Kualitas Piutang | Nilai Piutang Jk Panjang | % Penyisihan | Nilai Penyisihan |
|---|--------------------------|--------------|------------------|
| Tagihan TP/TGR | | | |
| Lancar | 16.565.000 | 0,50% | 82.825 |
| Kurang Lancar | - | 10% | - |
| Diragukan | - | 50% | - |
| Macet | - | 100% | - |
| Jumlah | 16.565.000 | | 82.825 |
| Tagihan PA | | | |
| Lancar | - | 0,50% | - |
| Kurang Lancar | - | 10% | - |
| Diragukan | - | 50% | - |
| Macet | - | 100% | - |
| Jumlah | - | | - |
| Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih | 16.565.000 | | 82.825 |

Aset Tak
Berwujud
Rp15.985.000,00

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah Rp15.985.000,00 dan Rp4.900.000,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Besar Penelitian dan

Pengembangan Pascapanen Pertanian yang digunakan merupakan Paten. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| | |
|---|-------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 | 4.900.000 |
| Mutasi tambah : | 11.085.000 |
| Transfer Masuk | 11.085.000 |
| Mutasi kurang : | - |
| Penghentian dari penggunaan | - |
| Saldo per 31 Desember 2017 | 15.985.000 |
| Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2017 | 1.897.250 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2017 | 14.087.750 |

Mutasi tambah Aset Tak Berwujud sebesar Rp11.085.000,00 diperoleh karena adanya transfer masuk dari Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Tak Berwujud Nomor: B-951/PL.310/H.1.1/05/2017 tanggal 8 Mei 2017 Aset Tak Berwujud tersebut adalah Paten atas :

1. Proses pembuatan kopi luwak buatan oleh Mulyana Hadipernata, MSc dkk sebesar Rp2.825.000,00
2. Proses pengolahan daun *uncaria gambier roxb* sebagai minuman antioksidan oleh Hernani dkk sebesar Rp3.185.000,00
3. Formula emulsin lilin untuk mempertahankan kesegaran buah –buahan oleh Dondy Anggono S dkk sebesar Rp2.825.000,00
4. Stick test kit untuk deteksi cepat mikroba total pada susu segar oleh Misgiyarta, SP.Msi sebesar Rp2.250.000,00

Terdapat selisih nilai buku per 31 Desember 2017 (*audited*) antara Laporan Amortisasi Barang Kuasa Pengguna Tahunan dengan daftar mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud tersebut diatas sebesar Rp700.000,00. Selisih disebabkan, terdapat Aset Tak

Berwujud hak lainnya berupapaten yang mempunyai masa manfaat tidak terbatas, sehingga tidak dilakukan amortisasi.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 (*audited*) adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017
(Audited)*

| Uraian | Nilai Perolehan |
|---------------------------|-------------------|
| Aset Tak Berwujud Lainnya | 700.000 |
| Paten | 15.285.000 |
| Jumlah | 15.985.000 |

Aset Lain-Lain

Rp1.939.503.800,00

C.4.2 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah Rp1.939.503.800,00 dan Rp262.850.001,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

| | |
|---|----------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 | 262.850.001 |
| Mutasi tambah : | 1.785.603.800 |
| Reklasifikasi dari aset tetap | 1.785.603.800 |
| Mutasi kurang : | 108.950.001 |
| Penggunaan kembali BMN yang dihentikan | 88.000.000 |
| Penghapusan BMN | 20.950.001 |
| Saldo per 31 Desember 2017 | 1.939.503.800 |
| Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2017 | 1.939.503.800 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2017 | - |

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penambahan diperoleh karena adanya reklasifikasi aset tetapperalatan dan mesin yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi senilai Rp1.785.603.800,00.

- Pengurangan disebabkan karena adanya penggunaan kembali BMN yang dihentikan senilai Rp88.000.000,00, yaitu berupa Toyota Kijang B 2766 MQ dan penghapusan BMN senilai Rp20.950.001,00 berupa Mitsubishi/Colt DX L300 dan Daihatsu/Pick Up.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi Aset
Lainnya
Rp1.941.401.050,00*

C.4.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing-masing Rp1.941.401.050,00 dan Rp263.630.001,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 (*audited*) adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

| No. | Aset | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan/Amortisasi | Nilai Buku |
|---------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1 | Aset Tetap yang tidak Digunakan | 1.939.503.800 | 1.939.503.800 | - |
| 2 | Paten | 15.285.000 | 1.897.250 | 13.387.750 |
| Jumlah | | 1.954.788.800 | 1.941.401.050 | 13.387.750 |

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp12.343.900,00

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) masing-masing sebesar Rp12.343.900,00 dan Rp00,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

| Uraian | Jumlah | Penjelasan |
|---------------------------|------------|--|
| Utang kepada Pihak ketiga | 12.343.900 | Kekurangan gaji, tunj. umum dan tunj. fungsional Tahun Anggaran 2017 untuk 8 pegawai yang dibayar di Tahun Anggaran 2018 |
| Total | 12.343.900 | |

Uang Muka dari
KPPN Rp0,00

C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp15.518.0000. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN

| No. | Uraian | Tahun |
|---------------|--------------------------|-------|
| 1 | Uang Persediaan | - |
| 2 | Tambahan Uang Persediaan | - |
| Jumlah | | - |

Ekuitas

Rp168.384.565.357,00

C.6.1 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp168.384.565.357,00 dan Rp106.163.076.881,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp1.120.264.396,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp1.120.264.396,00 dan Rp1.266.317.049,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2017 (Audited) dan 31 Desember 2016 (Audited)

| URAIAN | 31 DESEMBER 2017 | 31 DESEMBER 2016 | NAIK (TURUN) % |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan | 19.768.000 | 71.995.809 | (72,54) |
| Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | 2.139.750 | 3.566.250 | (40,00) |
| Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga | 1.097.890.000 | 1.143.465.000 | (3,99) |
| Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah | - | 47.280.000 | (100,00) |
| Pendapatan Anggaran Lain-lain | 466.646 | 9.990 | 4.571,13 |
| Jumlah | 1.120.264.396 | 1.266.317.049 | (11,53) |

1. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan diperoleh dari penjualan hasil penelitian Bioindustri Padi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp19.768.000,00.

2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan diperoleh dari sewa ruang kantor kantin dan koperasi dalam periode 31 Desember 2017 sebesar Rp2.139.750,00.
3. Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing - Masing Kementerian Negara/Lembaga diperoleh dari hasil jasa analisa Laboratorium periode 31 Desember 2017 sebesar Rp1.097.890.000,00.
4. Pendapatan Anggaran Lain-lain merupakan ongkos kirim dari konsumen untuk jasa pengiriman hasil analisa laboratorium kepada konsumen sebesar Rp466.646,00.

Beban Pegawai

Rp10.690.131.544,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp10.690.131.544,00 dan Rp10.333.413.291,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2017 (Audited)
dan 31 Desember 2016 (Audited)*

| URAIAN | 31 DESEMBER 2017 | 31 DESEMBER 2016 | NAIK (TURUN) % |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Beban Gaji Pokok PNS | 6.666.724.000 | 6.612.783.600 | 0,82 |
| Beban Pembulatan Gaji PNS | 84.031 | 80.949 | 3,81 |
| Beban Tunj. Suami/Istri PNS | 462.419.160 | 457.771.850 | 1,02 |
| Beban Tunj. Anak PNS | 133.554.974 | 137.459.737 | (2,84) |
| Beban Tunj. Struktural PNS | 54.490.000 | 48.380.000 | 12,63 |
| Beban Tunj. Fungsional PNS | 1.622.340.000 | 1.527.185.000 | 6,23 |
| Beban Tunj. PPh PNS | 95.699.359 | 181.780.895 | (47,35) |
| Beban Tunj. Beras PNS | 342.619.020 | 349.354.260 | (1,93) |
| Beban Uang Makan PNS | 856.586.000 | 795.558.000 | 7,67 |
| Beban Tunjangan Umum PNS | 129.200.000 | 135.615.000 | (4,73) |
| Beban Uang Lembur | 326.415.000 | 87.444.000 | 273,28 |
| Jumlah | 10.690.131.544 | 10.333.413.291 | 3,45 |

Beban pegawai per 31 Desember 2017 (*audited*) mengalami kenaikan sebesar 3,45% dari 31 Desember 2016 (*audited*). Hal ini disebabkan oleh:

1. Adanya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan kenaikan tunjangan fungsional untuk 127 PNS tahun berjalan, sehingga mengakibatkan beban pegawai atas beban gaji pokok PNS dan beban tunj. Fungsional PNS Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan.
2. Adanya penggantian jabatan struktural yang semula dijabat oleh PNS yang menduduki jabatan fungsional, namun pada tahun berjalan digantikan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural.
3. Adanya penyesuaian uang makan PNS dan uang makan lembur PNS per 14 Juni 2017, atas dasar PMK No.78/PMK.02/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang perubahan atas PMK No.33/PMK.02/2016 tentang

standar biaya masukan Tahun Anggaran 2017, salah satunya mengatur dan menindaklanjuti penyesuaian uang makan PNS dan uang makan lembur PNS, yang mengakibatkan beban pegawai atas beban uang makan PNS dan beban uang lembur mengalami kenaikan pada tahun berjalan Tahun Anggaran 2017.

4. Adanya hak PNS atas kenaikan gaji, kekurangan tunjangan umum dan kekurangan tunj. Fungsional yang menjadi beban pegawai Tahun Anggaran 2017 dan baru akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2018.

Beban Persediaan

Rp2.503.324.667,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp2.503.324.667,00 dan Rp3.194.308.636,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun Anggaran 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2017 (Audited) dan 31 Desember 2016 (Audited)

| URAIAN | 31 DESEMBER 2017 | 31 DESEMBER 2016 | NAIK (TURUN) % |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Beban Persediaan Konsumsi | 993.530.001 | 1.770.647.903 | (43,89) |
| Beban Persediaan Bahan Baku | 606.920.466 | 1.423.660.733 | (57,37) |
| Beban Persediaan Lainnya | 902.874.200 | - | #DIV/0! |
| Jumlah | 2.503.324.667 | 3.194.308.636 | (21,63) |

Beban persediaan per 31 Desember 2017 (*audited*) mengalami penurunan sebesar 21,63% dari per 31 Desember 2016 (*audited*). Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah *selfblocking* pada bulan Juli 2017 terhadap alokasi pagu Tahun Anggaran 2017. Sehingga pelaksanaan kegiatan manajemen maupun penelitian akan kebutuhan barang persediaan habis pakai yang menjadi beban persediaan tahun berjalan berkurang.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp4.570.130.941,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp4.570.130.941,00 dan Rp4.546.866.456,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2017(*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2017
(Audited) dan 31 Desember 2016 (Audited)*

| URAIAN | 31 DESEMBER 2017 | 31 DESEMBER 2016 | NAIK (TURUN) % |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| Beban Keperluan Perkantoran | 1.284.000.000 | 1.346.500.000 | (4,64) |
| Beban Penambah Daya Tahan Tubuh | 13.000.000 | 9.960.500 | 30,52 |
| Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 634.233 | - | #DIV/0! |
| Beban Honor Operasional Satuan Kerja | 186.030.000 | 225.000.000 | (17,32) |
| Beban Barang Operasional Lainnya | 76.725.000 | 73.630.000 | 4,20 |
| Beban Bahan | 745.684.600 | 707.430.225 | 5,41 |
| Beban Honor Output Kegiatan | 212.220.000 | 201.450.000 | 5,35 |
| Beban Barang Non Operasional Lainnya | 564.756.000 | 548.048.000 | 3,05 |
| Beban Langganan Listrik | 1.207.871.333 | 1.148.036.361 | 5,21 |
| Beban Langganan Telepon | 44.519.925 | 55.180.370 | (19,32) |
| Beban Langganan Air | 142.336.600 | 143.693.100 | (0,94) |
| Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya | 1.863.250 | 1.897.900 | (1,83) |
| Beban Jasa Konsultan | 21.990.000 | 11.990.000 | 83,40 |
| Beban Sewa | 12.500.000 | 15.825.000 | (21,01) |
| Beban Jasa Profesi | 56.000.000 | 58.225.000 | (3,82) |
| Jumlah | 4.570.130.941 | 4.546.866.456 | 0,51 |

Beban barang dan jasa sampai dengan per 31 Desember 2017 naik sebesar 0,51%. Hal ini disebabkan:

1. Adanya penambahan jasa konsultan Laboratorium ISO - 17025 untuk melakukan surveilan.
2. Adanya peningkatan penggunaan listrik yang disebabkan bertambahnya peralatan laboratorium
3. Bertambahnya kebutuhan obat - obatan untuk pegawai lingkup Kementerian Pertanian di Kampus Penelitian Cimanggu - Bogor.

Beban Pemeliharaan **D.5 Beban Pemeliharaan**

Rp2.001.490.802,00

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp2.001.490.802,00 dan Rp2.247.749.242,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2017 (Audited) dan 31 Desember 2016 (Audited)

| URAIAN | 31 DESEMBER 2017 | 31 DESEMBER 2016 | NAIK (TURUN) % |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 961.184.600 | 1.079.175.500 | (10,93) |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 819.974.802 | 929.980.717 | (11,83) |
| Beban Pemeliharaan Jaringan | 103.957.000 | - | #DIV/0! |
| Beban Pemeliharaan Lainnya | 31.033.500 | - | #DIV/0! |
| Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan | 81.490.900 | 97.233.875 | (16,19) |
| Beban Persediaan Suku Cadang | 3.850.000 | 141.359.150 | (97,28) |
| Jumlah | 2.001.490.802 | 2.247.749.242 | (10,96) |

Beban pemeliharaan sampai dengan per 31 Desember 2017 (*audited*) turun sebesar 10,96%. Hal ini disebabkan karena adanya penghematan biaya pemeliharaan.

Beban Perjalanan Dinas **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Dinas

Rp2.516.611.326,00

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing-masing

sebesar Rp2.516.611.326,00 dan Rp3.569.477.386,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban perjalanan dinas per 31 Desember 2017 (*audited*) mengalami penurunan sebesar 29,50% dari 31 Desember 2016 (*audited*). Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam penghematan biaya perjalanan menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan kegiatan, serta frekuensi rapat koordinasi yang dihemat. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2017 (Audited) dan 31 Desember 2016 (Audited)

| URAIAN | 31 DESEMBER 2017 | 31 DESEMBER 2016 | NAIK (TURUN) % |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Beban Perjalanan Biasa | 2.516.611.326 | 3.476.497.386 | (27,61) |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | - | 31.500.000 | (100,00) |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | - | 61.480.000 | (100,00) |
| Jumlah | 2.516.611.326 | 3.569.477.386 | (29,50) |

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp260.218.000,00

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp260.218.000,00 dan Rp1.378.754.800,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau

jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2017 (Audited) dan 31 Desember 2016 (Audited)

| URAIAN | 31 DESEMBER 2017 | 31 DESEMBER 2016 | NAIK (TURUN) % |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 260.218.000 | 1.378.754.800 | (81,13) |
| Jumlah | 260.218.000 | 1.378.754.800 | (81,13) |

Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda berupa Mesin Pengering Merk Agrindo Type ABD 3200 kapasitas tampung 3-3,5 ton; Corn Sheller Merk Gunung Kubota RD 65 DIH-15; Cleaner Type A2H; Separator Type AB-01 Merk Gunung Biru dan Unit Penyosoh (bayoney, kompresor, komponen penyosoh N-70), merupakan beban atas belanja peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun Anggaran 2015, yang baru diselesaikan penyerahannya kepada Pemda melalui BAST pada Tahun Anggaran 2017.

*Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp8.579.883.060,00*

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp8.579.883.060,00 dan Rp9.590.287.716,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*)

selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2017 (Audited) dan 31 Desember 2016
(Audited)*

| URAIAN | 31 DESEMBER 2017 | 31 DESEMBER 2016 | NAIK (TURUN) % |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 7.368.523.673 | 8.388.173.539 | (12,16) |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 989.203.520 | 716.874.735 | 37,99 |
| Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan | 129.748.718 | 396.072.968 | (67,24) |
| Beban Penyusutan Irigasi | 2.741.352 | 4.515.220 | (39,29) |
| Beban Penyusutan Jaringan | 84.453.998 | 84.501.254 | (0,06) |
| Beban Amortisasi Paten | 704.250 | 150.000 | 369,50 |
| Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah | 4.507.549 | - | #DIV/0! |
| Jumlah | 8.579.883.060 | 9.590.287.716 | (10,54) |

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp142.825,00*

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp142.825,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016

(audited) adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per 31 Desember 2017 (Audited) dan 31 Desember 2016
(Audited)*

| URAIAN | 31 DESEMBER 2017 | 31 DESEMBER 2016 | NAIK (TURUN) % |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| Beban Penyisihan Piutang PNBPN | 60.000 | - | #DIV/0! |
| Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/Tunt utan Ganti Rugi | 82.825 | - | #DIV/0! |
| Jumlah | 142.825 | - | #DIV/0! |

*Surplus/Defisit Dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp92.843.662,00*

D.10 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidakrutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2017 (audited) dan 31 Desember 2016 (audited) adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2017
(Audited) dan 31 Desember 2016 (Audited)*

| URAIAN | 30 SEPTEMBER 2017 | 31 DESEMBER 2016 | NAIK (TURUN) % |
|--|----------------------|-------------------|----------------|
| Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya | 3.000.000 | - | #DIV/0! |
| Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara | 38.253.500 | - | #DIV/0! |
| Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara | 51.405.142 | 64.234.786 | (19,97) |
| Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 185.020 | 55 | 336.300,00 |
| Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu | - | 26.147.850 | (100,00) |
| Surplus/(Defisit dari Kegiatan Non Operasional | 92.843.662 | 90.382.691 | 2,72 |

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN

EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp106.163.076.881,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp106.163.076.881,00 dan Rp106.138.988.556,00.

Defisit LO

Rp29.908.825.107,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah sebesar Rp29.908.825.107,00 dan Rp33.504.234.787,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Selisih Revaluasi

Aset Tetap

Rp70.034.308.311,00

E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp70.034.308.311,00 dan Rp0,00. Revaluasi Aset tersebut berasal dari revaluasi sebidang tanah milik satker di Surotokunto Rawabagus Karawang Timur, bangunan gedung di Surotokunto Rawabagus Karawang Timur dan Tentara Pelajar No.12 Bogor, pagar/jalan dan saluran lalu lintas air di Tentara Pelajar No.12 Bogor .

Transaksi Antar

Entitas

Rp22.096.005.272,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember

2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp22.096.005.272,00 dan Rp33.074.472.457,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017 (Audited) dan 31 Desember 2016 (Audited)

| URAIAN | 31 DESEMBER 2017 | 31 DESEMBER 2016 | NAIK (TURUN) % |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Ditagihkan ke Entitas Lain | 23.356.736.330 | 37.728.117.787 | (38,09) |
| Diterima dari Entitas Lain | (1.271.403.058) | (1.146.454.740) | 10,90 |
| Transfer Masuk | 10.672.000 | (3.507.190.590) | (100,30) |
| Jumlah | 22.096.005.272 | 33.074.472.457 | (33,19) |

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2017 (*audited*), DDEL sebesar Rp1.271.403.058,00 sedangkan DKEL sebesar Rp23.356.736.330,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 (*audited*) sebesar Rp10.672.000,00 terdiri dari

Paten atas:

1. Proses pembuatan kopi luwak buatan oleh Mulyana Hadipernata, MSc dkk sebesar Rp2.754.375,00
2. Proses pengolahan daun uncaria gambier roxb sebagai minuman antioksidan oleh Hernani dkk sebesar Rp3.025.750,00
3. Formula emulsin lilin untuk mempertahankan kesegaran buah –buahan oleh Dondy Anggono S dkk sebesar Rp2.754.375,00
4. Stick test kit untuk deteksi cepat mikroba total pada susu segar oleh Misgiyarta, SP.Msi sebesar Rp2.137.500,00

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 (*audited*) sebesar Rp0,00.

Terdapat selisih transfer masuk antara transaksi antar entitas pada Laporan Perubahan Ekuitas dengan mutasi tambah Aset Tetap Tak Berwujud sebesar Rp413.000,00. Selisih tersebut adalah amortisasi paten biasa periode berjalan.

Ekuitas Akhir

Rp168.384.565.357,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing - masing sebesar Rp168.384.565.357,00 dan Rp106.163.076.881,00

F.PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.1.1 Laporan Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan laporan temuan hasil audit Itjen No.R.48/PW.130/H.4/09/2015 tanggal 26 September 2015 perihal Laporan Hasil Audit Kinerja, pada tahun 2017 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian telah menyelesaikan proses penghapusan atas kendaraan roda 4 (empat) Daihatsu Pick Up B 8275 WS, sesuai surat Lelang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Wilayah Jawa Barat No.307/2017 tanggal 27 Februari 2017. Berdasarkan Risalah Lelang No. 307/2017 tanggal 27 Februari 2017 telah diterima pembayaran dari pihak ke tiga atas penjualan Daihatsu Pick Up B 8275 WS senilai Rp1.600.000,- dan telah disetorkan ke Kas Negara dengan No. NTPN 8B9A1011BGTA7Q9 tanggal 28 Februari 2017.

Berdasarkan laporan temuan hasil audit BPK RI tahun 2017, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian telah menyelesaikan proses penghapusan atas kendaraan roda 4 (empat) berupa satu unit mini bus kendaraan roda 4 (empat) merk/type Mitsubishi/Colt Diesel DX L300, tahun 1985 nomor polisi F 7086 A dengan nilai perolehan Rp14.550.000,-. sesuai surat Lelang yang

dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Wilayah Jawa Barat No.307/2017 tanggal 27 Februari 2017. Berdasarkan Risalah Lelang No. 307/2017 tanggal 27 Februari 2017 telah diterima pembayaran dari pihak ke tiga atas penjualan mobil Mitsubishi/Colt Diesel DX L300 senilai Rp1.400.000,-. Pembayaran tersebut sudah disetorkan ke Kas Negara dengan No. NTPN 8B9A1011BGTA7Q9 tanggal 28 Februari 2017.

F.1.2 Tidak Lanjut LHP

Pada tahun 2017 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pascapanen telah menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPK RI), atas Persediaan Belanja Barang 526 yang Sudah Diserahkan ke Masyarakat Senilai Rp218.891.800,00 untuk kabupaten **Minahasa** dan kabupaten **Tegal**.

Persediaan peralatan dan mesin yang diserahkan kepada masyarakat kabupaten **Minahasa** senilai Rp214.300.000,00 dengan Berita Acara No.B.195/PL.130/H/02/2017 tanggal 17 Februari 2017 berupa:

1. Mesin Pengering Merk Agrindo Type ABD 3200 kapasitas tampung 3-3,5 ton dengan nilai Rp186.500.000,00.
2. Corn Sheller Merk Gunung Kubota RD 65 DIH-15 dengan nilai Rp27.800.000,00.

Sedangkan persediaan peralatan dan mesin

yang diserahkan kepada masyarakat kabupaten **Tegal** senilai Rp45.918,000,00 dengan Berita Acara No.B.187/PL.130/H/01/2017 tanggal 3 Januari 2017 berupa :

1. Cleaner Type A2H dengan nilai Rp18.415.000,00
2. Separator Type AB-01 Merk GunungBiru dengan nilai Rp18.678.000,00
3. Unit Penyosoh (bayoney, kompresor, komponen penyosoh N-70) dengan nilai Rp8.825.000,00.

Persediaan Belanja Barang 526 tersebut di dalam Neraca sudah dikeluarkan dari Belanja Persediaan.

Pada tahun 2017 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian telah menindaklanjuti hasil temuan Itjen saat audit Kinerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian tanggal 18 Oktober 2017 sebesar Rp200.371.268,00, antara lain :

1. Sudah disetorkan ke Kas Negara uang senilai Rp4.000.000,00 pada tanggal 13 Nopember 2017 dengan No NTPN 252EC1KUFV9S7PCP atas temuan terhadap kegiatan Penelitian Bioindustri Padi Terpadu Menghasilkan Beras Premium, Beras Igr, Pupuk Silika dan Biopestisida untuk Meningkatkan Nilai Tambah.

2. Sudah disetorkan ke Kas Negara uang senilai Rp1.172.500,00 pada tanggal 1 Nopember 2017 dengan No NTPN D850F4IOJ23MM86P atas temuan terhadap kegiatan Penanganan Cabai Segar dan Pengolahan Bawang Merah Menuju Swasembada Nasional Penanggungjawab kegiatan agar menyetorkan PNBPN yang tertunda senilai Rp1.172.500,00 ke Kas Negara.
3. Sudah disetorkan ke Kas Negara uang senilai Rp1.501.500,00 pada tanggal 7 Nopember 2017 dengan No NTPN 510A00U85UD7R3PP atas temuan kegiatan Pengembangan Sistem Evaluasi Non-Destruktif Mutu Buah Mangga dan Manggis Menggunakan Pengolahan Citra.
4. Sudah diterbitkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKJM) atas nama Ir. Sunarmani, M.Si untuk mengembalikan tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional sejumlah Rp29.565.000,00, dengan cara dicicil selama 30 bulan, terhitung sejak bulan Desember 2017. Pada tanggal 6 Desember 2017 telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp1.000.000,00 dengan No NTPN CCB494K21JPJ1HBP.
5. Sudah disetorkan ke Kas Negara uang senilai Rp16.988.932,00, yang terdiri dari:
 - a) Sebesar Rp264.500,00 pada tanggal 7

Desember 2017 dengan No NTPN
7C9BB4K8CF3012BP

b) Sebesar Rp1.196.000,00 pada tanggal
7 Desember 2017 dengan No NTPN
893864K6KIVAB2BP

c) Sebesar Rp1.516.563,00 pada tanggal
7 Desember 2017 dengan No NTPN
828CE4K59PTT37BP

d) Sebesar Rp10.052.822,00 pada
tanggal 7 Desember 2017 dengan No
NTPN BOB554KD37BPVOBP

e) Sebesar Rp3.959.047,00 pada tanggal
7 Desember 2017 dengan No NTPN
9BE1E4KAJFHEBMBP atas
Kemahalan Harga Perawatan Gedung
Kantor senilai Rp16.988.932,00

6. Sudah disetorkan ke Kas Negara uang
senilai Rp4.251.000,00 pada tanggal 1
Nopember 2017 dengan No NTPN
30D78INT7JUUL6P atas Kelebihan
Pembayaran pada Pengadaan *Hydrant* dan
Instalasinya Senilai Rp4.251.000,00

7. Sudah disetorkan ke Kas Negara uang
senilai Rp4.437.500,00 pada tanggal 1
Nopember 2017 dengan No NTPN
C69694IND7CM2M6P atas Kelebihan
Pembayaran pada Konsultan Perencana
senilai Rp4.437.500,00

8. Sudah disetorkan ke Kas Negara PNB
yang belum disetorkan oleh Bendahara
Penerimaan Senilai Rp138.454.836,00
terdiri dari :

- a) PNBP Tahun 2016 sejumlah Rp27.742.210,00, yaitu
- 1) Sebesar Rp9.640.000,00 dengan bukti NTPN : 60BE81B8I8GEHO69 pada tanggal 20 Oktober 2017
 - 2) Sebesar Rp4.000.000,00 dengan bukti NTPN : B96401JD9O27IK69 pada tanggal 20 Oktober 2017
 - 3) Sebesar Rp14.102.210,00 dengan bukti NTPN : F213E4K3SD295BBP pada tanggal 6 Desember 2017
- b) PNBP Tahun 2017 sejumlah Rp92.381.626,00, yaitu:
- 1) Sebesar Rp26.165.000,00 dengan bukti NTPN : F35CC0K44HFOQ3DP pada tanggal 20 Oktober 2017
 - 2) Sebesar Rp21.645.000,00 dengan bukti NTPN : AAF1A0K3CLPRS1DP pada tanggal 20 Oktober 2017
 - 3) Sebesar Rp17.850.000,00 dengan bukti NTPN : 9A5B20K2LVC1T3DP pada tanggal 20 Oktober 2017
 - 4) Sebesar Rp14.150.000,00 dengan bukti NTPN : 4CDCF0MILL6A16DP pada tanggal 20 Oktober 2017
 - 5) Sebesar Rp3.150.000,00 dengan bukti NTPN : 5FB540MJ4PFGLQDP pada tanggal 20 Oktober 2017
 - 6) Sebesar Rp8.170.000,00 dengan bukti NTPN : 034DBOMIU38VIRDP pada tanggal 20 Oktober 2017

- 7) Sebesar Rp785.000,00 dengan bukti NTPN : 95CBA4K019IEPSBP pada tanggal 6 Desember 2017
- 8) Sebesar Rp466.646,00 dengan bukti NTPN : B69E73PIR3G8K4UP pada tanggal 7 Desember 2017
- c) PNBP Tahun 2017 sejumlah Rp18.330.000,00, yaitu:
- 1) Sebesar Rp6.710.000,00 dengan bukti NTPN : 9FAD21B9A46BFQ69 pada tanggal 20 Oktober 2017
- 2) Sebesar Rp8.050.000,00 dengan bukti NTPN : C27A23G0JR68FFFP pada tanggal 20 Oktober 2017
- 3) Sebesar Rp120.000,00 dengan bukti NTPN : 65C5B042EMG3NL19 pada tanggal 6 Nopember 2017
- 4) Sebesar Rp650.000,00 dengan bukti NTPN : DB4BA043AB8AAS19 pada tanggal 6 Nopember 2017
- 5) Sebesar Rp2.770.000,00 dengan bukti NTPN : FE25C1KTI9BGE3CP pada tanggal 13 Nopember 2017
- 6) Sebesar Rp30.000,00 dengan bukti NTPN : 99D381FIE3MI17FP pada tanggal 15 Desember 2017

F.1.3 Kerjasama Kemitraan

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertaniansemula mendapatkan

dana kerjasama penelitian sebanyak 11 (sebelas) judul kegiatan dengan total Rp3.660.272.000,- yang terdiri dari :

- 1.10 (sepuluh) judul kegiatan KKP4S dengan total Rp2.990.272.000,- sumber dana dari DIPA Badan Litbang Pertanian,
- 2.1 (satu) judul kegiatan RISTEK dengan total Rp670.000.000,00 sumber dana dari DIPA RISTEK.

Sehubungan adanya efisiensi penghematan belanja barang pada Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti kerjasama kegiatan RISTEK, maka untuk kegiatan kerjasama dengan RISTEK dipotong sebesar Rp201.000.000,00 sehingga dana kegiatan RISTEK menjadi Rp469.000.000,00. Jadi total dana kerjasama penelitian sebanyak 11 (sebelas) judul kegiatan saat ini sebesar Rp3.459.272.000,00.

Masing-masing kerjasama dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama, yaitu.

1. Network Establishment and Postharvest Technology Insertion to Improve The Quality of Shallot in Indonesia, dengan kontrak
No.55.68/HM.230/H.1/03/2017.K
tanggal 20 Maret 2017 – 15 Desember 2017;
2. Pengembangan Inovasi Teknologi Tepung Ubi Kayu Termodifikasi untuk Substitusi Terigu/CIRAD, dengan kontrak
No.55.72/HM.230/H.1/03/2017.K

- tanggal 20 Maret 2017 – 15 Desember 2017;
3. Formulasi dan Aplikasi Nanohidrogel Diperkaya Pupuk Makro pada Bawang Merah dan Cabe Merah di Lahan Pasir, dengan kontrak No.76.35/PL.040/H.1/04/2017.K tanggal 20 April 2017 – 15 Desember 2017;
 4. Teknologi Produksi Nano-Hidrokoloid dengan Metode Bottom Up, dengan kontrak No.76.37/PL.040/H.1/04/2017.K tanggal 20 April 2017 – 15 Desember 2017;
 5. Teknologi Pembuatan Nanobiosilika Cair dari Sekam Padi serta Pengaruh Aplikasinya Terhadap Pertumbuhan dan Produktivitas Tanaman Padi dan Mutu Beras Giling, dengan kontrak No.76.38/PL.040/H.1/04/2017.K tanggal 20 April 2017 – 15 Desember 2017;
 6. Pengembangan Teknologi Minyak Dedak Padi dengan Ekstraksi Non-Pelarut, dengan kontrak No.76.36/PL.040/H.1/04/2017.K tanggal 20 April 2017 – 15 Desember 2017;
 7. Pelaksanaan Insentif Pembinaan Kelembagaan Pusat Unggulan IPTEK Tahun 2017, dengan kontrak No.06/Kontrak/SWL/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 – 22 Desember 2017;
 8. Penyempurnaan Model Bioindustri Berbasis Sagu di Propinsi

- Papua, dengan kontrak No.99.7/HM.230/H.1/05/2017.K tanggal 29 Mei 2017 – 15 Desember 2017;
9. Implementasi Model Pengeringan Penyimpanan (Instore Drying) dan Pengolahan Bawang Merah di Kabupaten Solok - Sumbar, dengan kontrak No.99.8/HM.230/H.1/05/2017.K tanggal 29 Mei 2017 – 15 Desember 2017;
 10. Pengembangan Teknologi Bioindustri padi untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing di Wilayah Perbatasan, dengan kontrak No.90.26/HM.230/H.1/05/2017.K tanggal 15 Mei 2017 – 15 Desember 2017;
 11. Implementasi Model Bioindustri Penanganan dan Pengolahan Jagung Terpadu di Kab. Karo Sumatera Barat, dengan kontrak No.147.5/HM.230/H.1/08/2017 tanggal 3 Agustus 2017 – 15 Desember 2017.

F.1.4 Revisi POK dan DIPA

Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian sesuai surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP-DIPA - 018.09.2.648669/2016, Tanggal 7 Desember 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp23.820.000.000,00. Dalam pelaksanaannya selama bulan Januari – Desember 2017 telah mengalami 9

(sembilan)kali revisi POK dan 9 (sembilan) kali revisi DIPAdengan tidak mempengaruhi terhadap pagu DIPA Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian.

Revisi POK telah terjadi 9 (sembilan) kali, sebagai berikut :

Revisi POK ke 1 pada tanggal 5 Juni 2017, terjadi karena adanya pergeseran alokasi anggaran antar sub komponen/akun/detil dan penyesuaian judul Sub komponen pada Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan (018.09.12) kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian (1799). Revisi dilakukan karena adanya *refocusing* output kegiatan dan perubahan struktur internal BB Pascapanen.

Revisi POK ke 2 pada bulan Juni 2017, terjadi karena adanya pergeseran alokasi anggaran antar sub output/komponen/akun, penyesuaian judul dan penyesuaian detil pada Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan.

Revisi POK ke 3 pada tanggal 20 Juli 2017, terjadi karena adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Alokasi efisiensi anggaran BB Pascapanen sebesar Rp. 100.000.000,- yang diambil dari belanja barang. Dengan adanya efisiensi tersebut maka dilakukan *selfblocking* yang menyebabkan adanya pergeseran alokasi anggaran antar sub output/komponen/akun, penyesuaian judul dan penyesuaian detil pada Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan.

Revisi POK ke 4 pada tanggal 16 Agustus 2017, terjadi karena adanya penghapusan pemblokiran. Efisiensi belanja barang pada output Teknologi Pascapanen (Penanganan dan Pengolahan) sebesar Rp. 15.000.000,-; pada output Diseminasi Teknologi Litbang Pascapanen sebesar Rp. 40.000.000,-; pada output Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pascapanen Pertanian sebesar Rp. 20.000.000,-; pada output Layanan Internal (Overhead) sebesar Rp. 5.000.000,-; dan output Layanan Perkantoran sebesar Rp. 20.000.000.

Revisi POK ke 5 pada tanggal 11 September 2017, terjadi karena adanya penyesuaian kebutuhan anggaran masing-masing kegiatan untuk memenuhi prioritas kebutuhan dan mempercepat pencapaian kinerja serta meningkatkan efektivitas. Terjadi pula pergeseran antar

output pada output Diseminasi Teknologi Litbang Pascapanen, Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pascapanen Pertanian dan Layanan Perkantoran.

Revisi POK ke 6 pada tanggal 28 September 2017, terjadi karena pergeseran alokasi anggaran antar output Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan (018.09.12) kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian (1799) pada tiga output sebagai berikut :

- Output Diseminasi Teknologi Litbang Pascapanen, pergeseran alokasi anggaran dialihkan ke output Layanan Internal (Overhead) sebesar Rp. 120.000.000,-.
- Output Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pascapanen Pertanian pergeseran alokasi anggaran dialihkan ke Output Layanan Internal (Overhead) sebesar Rp. 38.000.000,-.
- Output Layanan Internal (Overhead) pergeseran alokasi anggaran sebesar Rp. 158.000.000,- dialihkan dari Output Diseminasi Teknologi Litbang Pascapanen sebesar Rp. 120.000.000,- dan Output Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pascapanen Pertanian sebesar Rp. 38.000.000,-

Revisi POK ke 7 pada 31 Oktober 2017, terjadi karena adanya pergeseran alokasi anggaran antar akun/detil dari beberapa sub komponen. Revisi dilakukan untuk penyesuaian kebutuhan anggaran masing-masing kegiatan untuk memenuhi prioritas kebutuhan dan mempercepat pencapaian kinerja serta meningkatkan efektivitas.

Revisi POK ke 8 pada 10 November 2017, terjadi karena adanya penyesuaian kebutuhan anggaran masing-masing kegiatan untuk memenuhi prioritas kebutuhan dan mempercepat pencapaian kinerja serta meningkatkan efektivitas.

Revisi POK ke 9 pada tanggal 28 November 2017, terjadi karena adanya penyesuaian kebutuhan anggaran masing-masing kegiatan untuk memenuhi prioritas kebutuhan dan mempercepat pencapaian kinerja serta meningkatkan efektivitas.

Revisi DIPA ke-1 tanggal 5 Juni 2017 terjadi karena adanya *refocusing* output kegiatan dan perubahan struktur internal Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian.

Revisi DIPA ke-2 tanggal 19 Juni 2017 terjadi karena adanya revisi POK ke-2 yang secara otomatis menimbulkan revisi DIPA.

Revisi DIPA ke-3 tanggal 20 Juli 2017 terjadi karena adanya *Selfblocking* yang menyebabkan adanya pergeseran alokasi anggaran antar sub output/komponen/akun, penyesuaian judul dan penyesuaian detil pada Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan.

Revisi DIPA ke-4 tanggal 16 Agustus 2017 terjadi karena adanya revisi anggaran APBN-P TA 2017 yang menyebabkan perubahan pagu anggaran DIPA.

Revisi DIPA ke-5 tanggal 11 September 2017 terjadi karena adanya pemutakhiran data POK ke-5 yang merupakan proses penyamaan data arsip data komputer atas revisi POK.

Revisi DIPA ke-6 tanggal 28 September 2017 terjadi karena adanya pergeseran alokasi anggaran antar output.

Revisi DIPA ke-7 tanggal 31 Oktober 2017 terjadi karena karena adanya pergeseran alokasi anggaran antar output.

Revisi DIPA ke-8 tanggal 10 Nopember 2017 terjadi karena adanya penyesuaian dan pergeseran alokasi anggaran antar output.

Revisi DIPA ke-9 tanggal 28 Nopember 2017 terjadi karena adanya penyesuaian dan pergeseran alokasi anggaran antar output.

